

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan persoalan dunia yang tidak pernah hilang. Dunia menanggapi persoalan ini dengan pertemuan dan melahirkan deklarasi. Deklarasi tersebut yang dikenal dengan *The Millenium Development Goals* (MDGs) pada September 2000 diikuti oleh 189 Negara (Raharjo, 2015). Target utama dalam pertemuan itu mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada di dunia. Deklarasi yang mencetuskan MDGs bahwa kemiskinan menjadi tanggung jawab semua negara yang ada di dunia. MDGs merupakan cikal bakal dari dasar pembangunan Internasional yaitu SDGs.

Pada 21 Oktober 2015 dideklarasikan SDGs (*Sustainable Development Goals*) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030. Disepakati dan diadopsi oleh 193 negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). SDGs melanjutkan agenda MDGs, disertai pengembangan menjadi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target. Perluasan cakupan agenda ini diharapkan mampu untuk lebih tanggap atas penyebab utama kemiskinan serta kebutuhan universal. Tujuan SDGs mencakup tiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan. Pendekatan SDGs ini memperkuat pencapaian sasaran agenda MDGs, tertuju pada sasaran akhir

mengentaskan kemiskinan di tahun 2030 dengan semangat “*no one left behind*” (Wahyuningsih, 2018).

Indonesia sebagai bagian anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentunya juga berkomitmen untuk mengatasi masalah kemiskinan. Jika dilihat kemiskinan di Indonesia merupakan sebuah persoalan yang berat karena menyangkut isu kesenjangan yang lebar antara “kaya” dengan “miskin”(Bhayu Pratama et al., 2020) . Isu kesenjangan tersebut juga dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh *World Bank*. Terdapat 25,9 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dari total seluruh penduduk di Indonesia (World Bank, 2019). Maka dapat dilihat bahwa sekitar 10% dari penduduk indonesia dapat dikatakan masih berada dibawah garis kemiskinan.

Untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi agenda prioritas dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RJPN 2005-2025) pada tingkatan nasional hingga ke tiap kabupaten kota, dimana pada setiap penargetannya harus sesuai dengan (RPJPN 2005- 2025) (Arifin, 2020). Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005- 2025 terlihat jelas bahwa pemerintah indonesia mulai memasukkan beberapa program terkait dengan kemiskinan sesuai dengan kerangka SDGs. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan sebuah kesepakatan global yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan dengan skala global (Bhayu Pratama et al., 2020)

Di dalam tujuan pertama SGDs penghapusan kemiskinan yang memiliki kesinambungan dengan tujuan lain yang dicanangkan. Tujuan selanjutnya seperti dunia

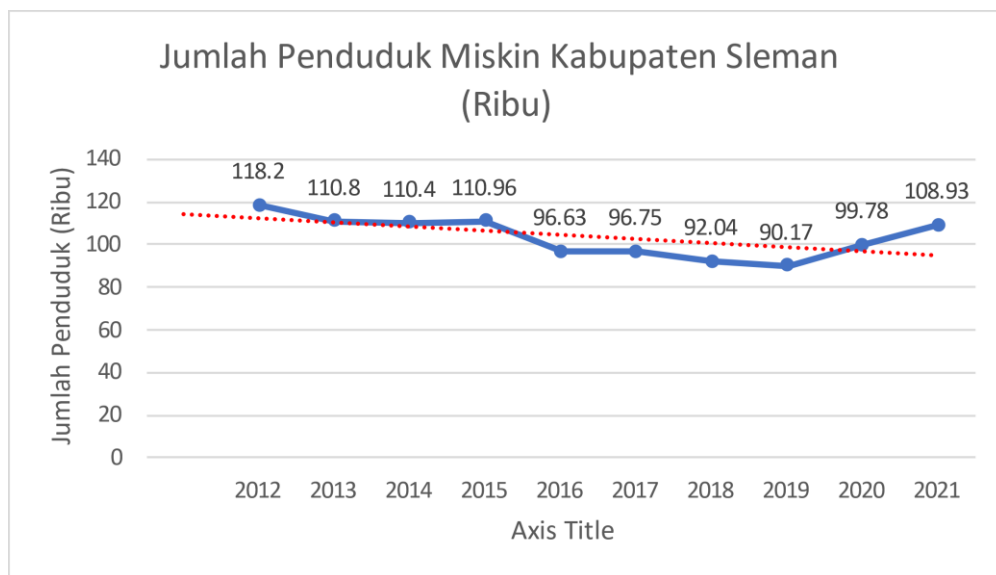
tanpa kelaparan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan serta tujuan yang lain. Hal tersebut akan dapat terselesaikan apabila kemiskinan dapat ditekan atau setidaknya dikurangi. Membahas permasalahan kemiskinan tentu saja bukan menjadi masalah pemerintah pusat akan tetapi untuk pengentasan kemiskinan pemerintah daerah harus ikut andil dalam melaksanakannya.

Program pengentasan kemiskinan juga diupayakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia termasuk Pemerintah Provinsi Daerah Yogyakarta terus mengupayakan penekanan angka kemiskinan. Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk ke dalam salah provinsi termiskin di pulau Jawa (Bhayu Pratama et al., 2020). Kemiskinan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta masih relatif tinggi apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan secara nasional. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi yang memiliki persentase kemiskinan sebesar 11.9% dan menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa (BPS, 2019).

Penduduk miskin di DIY tersebar pada Kabupaten/Kota berdasarkan data persentase dari BPS Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Kulon Progo yang memiliki persentase sebesar 18,38%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan 4 Kabupaten/Kota lainnya. Kabupaten dengan penduduk miskin besar lainnya adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 17,69%, kemudian Kabupaten Bantul sebesar 14,04%, selanjutnya Kabupaten Sleman memiliki persentase sebesar 8,64% dan yang terakhir pada Kota Yogyakarta memiliki persentase kemiskinan sebesar 7,64%. Dari data tersebut dapat dilihat penduduk miskin

terbanyak berada di Kabupaten Kulon Progo dibandingkan dengan Kabupaten Sleman yang memiliki penduduk paling banyak di Provinsi DIY akan tetapi Kabupaten Sleman berada di posisi ke 4 (empat) yang memiliki perentase penduduk lebih kecil dibandingkan Kabupaten lainnya. Berikut merupakan gambar jumlah penduduk miskin yang berada di Kabupaten Sleman

**Gambar 1. 1 Jumlah Kemiskinan Kabupaten Sleman**



*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman 2021*

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya Kabupaten Sleman terus mengalami penurunan jumlah kemiskinan dengan kata lain terus mengalami perbaikan kesejahteraan masyarakat menuju kemakmuran. Meskipun kondisi kemiskinan di Kabupaten Sleman selama periode ini cukup fluktuatif, yang artinya berubah-ubah atau tidak tetap, jika dilihat dari tahun 2012-2019 terjadi penurunan dan kenaikan jumlah kemiskinan, akan tetapi jika dilihat dari gambar di atas pada kurun 5

tahun terakhir dimana pada tahun 2012-2016 terjadi penurunan jumlah kemiskinan yang *significant* dimana pada tahun 2012 angka kemiskinan 118,20 ribu dan pada tahun 2016 menjadi 96.63 ribu. Dari data tersebut dapat disimpulkan Kabupaten Sleman lebih dominan dalam penurunan jumlah penduduk miskin hal ini dilihat dari grafik trendline yang cenderung menurun.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengeluarkan kebijakan baru dengan merumuskan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang penanggulangan kemiskinan yang merujuk pada UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dimana dalam mengentaskan kemiskinan terdapat upaya yang memerlukan arah kebijakan, strategi dan sasaran yang terukur dan terpadu agar berdaya guna dan berhasil dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial (Suharno, 2021). Hal ini juga selaras dengan pasal 1 ayat (2) yang berbunyi penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan serta program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan besinergi dalam dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan salah satu tujuan dari konsep SDGS dari 17 goals yang ada yaitu mewujudkan “tanpa kemiskinan” di tahun 2030. Target menanggulangi kemiskinan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk dapat mencapainya. Dalam hal ini sudah di atur di dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selain itu masalah kemiskinan

merupakan salah satu masalah sosial yang selalu menjadi fokus utama pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan (Rakhmat & Firdaus, 2019). Pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah melalui penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan guna memperkuat dan mencapai tujuan dari konsep SDGs.

Dalam melakukan penanggulangan kemiskinan hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang diberikan kewenangan untuk mengentaskan masalah kemiskinan guna memperkuat SDGs. Untuk mengatasi masalah kemiskinan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (T2NPK) yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. TNP2K adalah organisasi yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan sebagai wujud pembangunan berdasarkan *Sustainable Development Goals*, Kabupaten Sleman membentuk suatu lembaga yang bertugas menanggulangi kemiskinan yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Sleman sesuai dengan Surat Keputusan Bupati nomor 136/Kep.KDH/ A/2010 perihal upaya menanggulangi kemiskinan. Untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tersebut

maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sebagai upaya optimalisasi strategi penanggulangan kemiskinan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sleman dibentuk sebagai lembaga koordinasi untuk menanggulangi kemiskinan di tingkat Kabupaten yang bertujuan untuk mempercepat proses penanggulangan dan penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman. Meskipun dalam penanganan kemiskinan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, salah satunya adalah pemerintah daerah setempat. Akan tetapi hasil kerja penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilihat dalam waktu jangka pendek. Oleh karenanya dibutuhkan perencanaan, koordinasi, strategi dan kerja sama yang melibatkan seluruh elemen untuk melakukan penanggulangan kemiskinan secara efektif dan efisien berlandaskan tugas dan wewenang dari pemerintah daerah itu sendiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari permasalahan yang telah dijabarkan di atas mengindikasikan bahwa dalam praktiknya TKPKD Kabupaten Sleman berhasil menurunkan angka jumlah penduduk miskin pada tahun 2012-2016 yang sesuai dengan tujuan dari kerangka SDGs. Dalam hal ini strategi yang digunakan TKPKD cukup optimal dalam menurunkan jumlah angka kemiskinan. Kemudian pada penelitian ini peneliti ingin berfokus pada “Strategi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam Menanggulangi Kemiskinan Untuk Memperkuat SDGs”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam Menanggulangi Kemiskinan Untuk Memperkuat *Sustainable Development Goals* (SDG’s) di Kabupaten Sleman”.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian bertujuan untuk mengetahui strategi TKPKD dalam upaya mempercepat penurunan kemiskinan dalam memperkuat Sustainable Development Goals (SDGs) di Kabupaten Sleman.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta bagi pengembangan ilmu pengetahuan umum dan ilmu pemerintahan khususnya, juga dapat digunakan sebagai bahan tambahan referensi bagi mahasiswa/ilmu pemerintahan kedepannya serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam membuat strategi penanggulangan kemiskinan.



## 1.4.2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan ataupun gambaran untuk pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan selanjutnya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.

### b. Bagi Lembaga Terkait

Sebagai masukan dan bahan evaluasi untuk Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah agar dapat menanggulangi kemiskinan secara maksimal.

### c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi sekaligus mengetahui arah kebijakan dan program pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan.

## 1.5. Studi Pustaka

**Tabel 1.1. Studi Pustaka**

No.	Nama Penulis	Judul	Hasil
1.	(Suharno, 2021)	Keadilan Sosial Dalam Pelaksanaan PERDA Kabupaten Sleman Nomor Tahun 2017 Tentang	Implementasi Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan telah berhasil mencapai ukuran dan tujuannya, namun masih dengan beberapa

		Penanggulangan Kemiskinan	catatan-catatan. Sumber daya, sisi disposisi, karakteristik agen pelaksana, komunikasi, dan hubungan organisasi saat ini dinilai sudah cukup baik. Walaupun komunikasi dan hubungan organisasi pada dua tahun pertama ini mengalami masalah.
2.	(Alfisyahrin, 2021)	Optimalisasi Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Tkpkd) Dalam Perspektif Diskresi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Kota Semarang	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah harus terus berupaya dalam penyusunan program dan pemantauan pelaksanaan program dimasing-masing dinas maupun badan pemerintahan, agar penanggulangan kemiskinan benar-benar dilaksanakan sesuai program dan jangka waktu yang ditentukan.
3.	(Azhari, 2022)	Starategi Pengembangan Usaha Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Pekanbaru	Dengan meningkatnya angka kemiskinan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau berupaya bersama stakeholder untuk melakukan program pengentasan kemiskinan melalui strategi pengembangan usaha. Program ini terlaksana tetapi tidak terlaksana dengan baik sesuai tujuan karena masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut.
4.	(Friwarti, 2013)	Fungsi koordinasi Dinas Sosial terhadap Kecamatan dalam penanggulangan	Koordinasi merupakan suatu hal yang penting dilakukan oleh berbagai pihak untuk saling memberikan Informasi. Dalam hal ini fungsi koordinasi Dinas

		kemiskinan di Aceh Barat	Sosial terhadap Kecamatan belum sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, sehingga masih terdapat masyarakat miskin di Aceh Barat yang belum menerima bantuan-bantuan sosial sehingga penanggulangan kemiskinan belum berjalan secara optimal.
5.	(Donna Fitria dan Sujianto, 2017)	Pelaksanaan Tupoksi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Siak sudah sesuai dengan tupoksi nya. Kebijakan yang telah dilaksanakan untuk menanggulangi kemiskinan dengan melibatkan seluruh SKPD dan pihak swasta sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis. Hanya saja terdapat hambatan karena keterbatasan sumber daya manusia dalam memantau memonitor pelaksanaan tugas pokok dan fungsi TKPK.
6.	(Nugroho, 2014)	Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Deskriptif di Kelurahan Tambaan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan)	Kebijakan TKPK Kota Pasuruan dalam membuat program penanggulangan kemiskinan belum terdistribusi secara menyeluruh. Seperti di Kelurahan Tambaan terdapat masyarakat miskin yang sudah berhenti menerima bantuan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor baik dari masyarakat sendiri atau pemerintah. Sehingga Pemerintah Kota harus bisa

			mengevaluasi dan mengawasi kebijakan yang telah dibuat agar dapat terlaksana dengan baik.
7.	(Fadilla, 2018)	Analisis Kebijakan Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kota Tangerang Provinsi Banten	Kebijakan dan strategi pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Tangerang selama periode 2011-2014 menuai hasil baik dimana jumlah penduduk miskin menurut data BPS Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2015 mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2014 memperlihatkan adanya penurunan persentase penduduk. Ini menggambarkan bahwa adanya sinergi antara aktor-aktor pelaku dan pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam menjalankan kebijakan dan strategi pengentasan kemiskinan
8.	(Wahyu Dewi Kesuma, 2019)	Manajemen Strategi Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (Gertak) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Trenggalek benar-benar berusaha keras dalam melaksanakan Program GERTAK, guna menanggulangi masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Terkait perumusan strategi, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Trenggalek juga melakukannya secara maksimal. Hal tersebut dibuktikan dari beberapa strategi dan alternatif yang sangat berguna untuk menyempurnakan program GERTAK

9.	(Susilowati, 2018)	Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kediri Tahun 2017	Penelitian ini berjudul Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kediri Tahun 2017. Tujuan penelitian Menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Tahun 2017; Mendeskripsikan capaian beserta kendala dan permasalahan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kediri tahun 2017 Metode penelitian yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah Analisis Deskriptif
10.	(Samsul et al., 2022)	TKPKD dan Kemiskinan Masyarakat Pedesaan Studi Kasus Wilayah Pedesaan Kabupaten Konawe Selatan	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai lembaga struktural yang sangat menentukan kesuksesan dan kegagalan Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis), terutama yang mengemuka di wilayah pedesaan. Karena itulah, maka penelitian ini diarahkan pada upaya refungsionalisasi TKPKD sebagai kelembagaan struktural melalui pendekatan kualitatif yang berintikan pada studi kasus

Dari 10 penelitian terdahulu yang telah penulis jabarkan, yang menjadi pembeda dengan peneliti-penelitian sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini mempunyai identifikasi pada kelembagaan khususnya untuk menanggulangi kemiskinan dalam memperkuat konsep sustainable development goals (pembangunan

berkelanjutan) melalui strategi yang dilaksanakan oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sleman. Penelitian ini berfokus pada penguatan SDGs melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) untuk menurunkan jumlah kemiskinan. Pada penelitian sebelumnya belum ditemukan kelembagaan khusus yang menanggulangi kemiskinan untuk memperkuat SDGs

## **1.6. Kerangka Teori**

### **1.6.1. Strategi**

#### **a. Definisi Strategi**

Kata strategi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *strategos* atau *stretus* dengan kata jamak *strategi*. *Strategos* sendiri memiliki generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang (Salusu, 2006: 84). Menurut Brecker (dalam Saputra & Rulandari, 2020) penggunaan kata *Strategos* itu dapat diartikan sebagai perencanaan dan pemusnahan musuh-musuh dengan menggunakan cara yang efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimiliki. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan yang telah terpola atau terencana untuk mencapai tujuan.

Menurut Potter (1998) (dalam Arifin, 2017) mengatakan strategi sebagai suatu seni dan ilmu dari pembuatan formulating), (penerapan (implementing), dan evaluasi (evaluating) keputusan-keputusan strategis antar fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan di masa

mendatang. Beberapa ahli mendefinisikan strategi dengan penekanan-penekanan yang berbeda. Menurut (Yunus,2016) strategi merupakan suatu tindakan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas suatu keputusan serta tindakan terkait strategi dari perusahaan. Definisi strategi menurut Hamel dan Prahalad yang dikutip Rangkuti (2002) (dalam Rahma et al., 2019) , strategi adalah rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan jangka panjang melalui pengintegrasian keunggulan dan alokasi sumber daya yang ada di perusahaan (Rahma et al., 2019).

Berdasarkan berbagai definisi tentang strategi yang dikemukakan oleh para ahli maka dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu rumusan perencanaan untuk membuat keputusan dalam mencapai tujuan jangka panjang melalui pengintergrasian dan alokasi sumber daya agar tujuan organisasi dapat tercapai dan tepat sasaran aktivitas perencanaan dan manajemen yang menggunakan taktik operasional untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan.

## **b. Tipe Strategi**

Setiap organisasi pasti memiliki strategi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi tidaklah sama. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Kotten( dalam Salusu, 2006 : 104-105) membagi strategi berdasarkan tipenya sebanyak 4 tipe. Adapun tipe-tipenya adalah sebagai berikut:

1. Strategi Organisasi (Corporate Strategy)

Dalam strategi organisasi, sebuah strategi dirumuskan melalui visi dan misi suatu pemerintah daerah atau instansi yang dituangkan ke dalam suatu program atau kegiatan-kegiatan. Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi organisasi ini adalah Visi dan misi.

2. Strategi Program (Program Strategy)

Strategi program ini lebih memberikan perhatian kepada implikasi-implikasi strategi dari suatu program. Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi program ini adalah Apakah strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau instansi akan memberikan dampak positif baik terhadap instansi maupun masyarakat, atau malah sebaliknya.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)

Strategi pendukung sumber daya merupakan suatu strategi yang memanfaatkan segala sumber daya yang ada dalam sebuah pemerintah



daerah atau instansi. Adapun aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi sumber daya ini adalah:

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana atau lebih dikenal dengan peralatan adalah setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk memperlancar atau mempermudah pekerjaan atau gerak aktivitas dari instansi daerah maupun Pemerintahan Daerah.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan suatu aset atau modal non-material yang harus tersedia dengan baik bagi terwujudnya tujuan dari suatu instansi yang merupakan motor penggerak bagi pelaksanaan segala program dan kegiatan dari sebuah instansi tersebut.

c. Sumber daya finansial

Keuangan merupakan salah satu faktor yang sangat urgen dari setiap kegiatan yang dilaksanakan dari sebuah instansi. Suatu kegiatan tidak akan dapat berjalan baik jika tidak didukung oleh ketersediaan finansial dalam sebuah instansi.

4. Strategi Kelembagaan

Dalam strategi kelembagaan ini, kekuatan strategi dari suatu instansi terhadap suatu masalah terletak pada bagaimana instansi tersebut dapat memanfaatkan semaksimal mungkin unsur-unsur kelembagaan (aturan, SOP, tanggung jawab serta kewenangan) yang dimilikinya untuk dapat mendukung pelaksanaan dari suatu kegiatan.

## **1.6.2. Kemiskinan**

### **a. Definisi Kemiskinan**

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Badan Pusat Statistik mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau disebut juga batas kemiskinan (*poverty threshold*) (Ferezegia, 2018).

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan terjadinya ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Ritonga (dalam Satibi & Sudrajat, 2019) kemiskinan juga merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga, sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya.

Menurut Booth dan Me Cawley (dalam Syafrina, 2019) menyatakan bahwa "di banyak negara memang terjadi kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapitanya, tetapi itu hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakatnya, sedangkan sebagian besar masyarakat miskin kurang memperoleh manfaat apa-apa, bahkan sangat dirugikan".

Menurut BAPPENAS (2004) (dalam Fadilla, 2018) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya antara lain: pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Menurut Chambers (dalam Suryawati, 2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis.

## **b. Bentuk-Bentuk Kemiskinan**

Menurut Chambers (dalam Khomsan et al., 2015) kemiskinan dibagi menjadi empat bentuk :

1) Kemiskinan absolut, apabila pendapatan berada dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

2) Kemiskinan relative, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

3) Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar

4) Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

### **c. Indikator Kemiskinan**

Untuk mengetahui suatu kondisi kemiskinan maka dapat diukur berdasarkan beberapa indikator. Menurut Adisasmita (dalam Ferezegia, 2018) indikator kemiskinan yang digunakan secara umum adalah tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar, proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan pangan (kalori/protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan perkapita dan distribusi pendapatan.

Menurut Badan Pusat Statistik dalam (Mutiarin & Khadafi, 2017) kemiskinan dalam masyarakat dihitung berdasarkan garis kemiskinan dengan masyarakat yang berpenghasilan di bawah US\$ 1,7 orang perhari. Angka tersebut ditetapkan berasal dari kebutuhan makanan dan non makanan. Menurut *World Bank* dalam (Mutiarin & Khadafi, 2017) penetapan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita penduduk yang kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan per kapita nasional.

### **1.6.3. Sustainable Development Goals**

#### **a. Konsep SDGs**

Sebutan SDGs diusulkan untuk menjadi agenda pembangunan global yang pertama kali diusulkan Pemerintah Kolombia, Peru, Guatemala dan Uni Emirat Arab sebelum konferensi Rio 20+ pada tahun 2012. Dimana SDGs diharapkan menjadi suatu agenda pembangunan yang mampu menghadapi tantangan lama dan baru yang semakin meningkat dan juga menjadi suatu agenda transformasi yang akan membentuk kembali perkembangan global yang bermanfaat bagi generasi yang akan datang (Sutopo et al., 2014).

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015, Millennium Development Goals (MDGs). Konsep SDGs melanjutkan konsep pembangunan Millennium Development Goals (MDGs) di mana konsep itu sudah berakhir pada tahun 2015. Jadi, kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang semula menggunakan konsep MDGs sekarang diganti SDGs (Wahyuningsih, 2018)

Konsep SDGs mempunyai tiga pilar indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, pertama indikator yang melekat pembangunan manusia (Human Development), di antaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (Social Economic Development), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (Environmental Development), berupa

ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik (Wahyuningsih, 2018)

#### **b. Tujuan SGDs**

Sustainable Development Goals memiliki salah satu agenda internasional yang disusun oleh PBB, dalam rangka ingin mensejahterakan masyarakat dunia. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi di negara yang membutuhkan bantuan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka disusunlah 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (Sutopo et al., 2014):

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi dan mencanangkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan.

7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan berkelanjutan dan modern.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara.
11. Membuat kota dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.



16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan pertama dari Sustainable Development Goals adalah tanpa kemiskinan (no poverty) yaitu mengakhiri kemiskinan dimanapun dan dalam semua bentuk.

Adapun target-target yang memuat tujuan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Menghapus kemiskinan ekstrim (penduduk di bawah garis kemiskinan) dengan daya beli kurang dari \$1,25 PPP (Purchasing Power Parity) atau sekitar Rp.7.800, per hari.
2. Mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk miskin berdasarkan definisi nasional.
3. Di tingkat nasional mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat bagi semua level masyarakat.
4. Memastikan semua penduduk, terutama penduduk miskin dan rentan mendapat hak setara mengakses sumber ekonomi. Kepemilikan hak akses pada lahan.
5. Membangun yang dibutuhkan dan layanan keuangan termasuk keuangan mikro, daya tahan dan kesiapan masyarakat miskin dan

kelompok rentan menghadapi perubahan iklim, krisis lingkungan, ekonomi, sosial dan bencana.

#### **1.6.4. Pemerintah Daerah**

##### **a. Konsep Pemerintah Daerah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu sebagai atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Demikian salah satu bunyi UUD 1945 hasil amandemen pada Bab VI Pasal 18 ayat 1. Selanjutnya, masih dalam UUD 1945 hasil amandemen pada Bab VI Pasal 18 ayat 3 dikatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya, tentang pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dikatakan pula bahwa “Gubernur, Bupati, dan wakil kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 huruf b: “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai fungsi-fungsi pemerintahan daerah otonomi yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dan DPRD yang merupakan lembaga pemerintahan daerah menurut asas desentralisasi” Pasal 1 huruf c: “Pemerintahan daerah adalah unsur lembaga pemerintahan daerah yang

terdiri dari kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain, yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif daerah.

Perubahan lain adalah terdiri dari susunan pemerintahan daerah, dulu berdasarkan UU No. 5 tahun 1974, Pemerintahan daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD, sedangkan menurut UU No. 22 tahun 1999 Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Sementara DPRD disebut sebagai Badan Legislatif Daerah.

#### **b. Organisasi Perangkat Daerah**

Organisasi Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat (Leiwakabessy, 2020)

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (PP Perangkat daerah) yang mengamanatkan kepada daerah (provinsi/kabupaten/kota) untuk segera membentuk organisasi perangkat daerah (Doktor et al., 2016). Penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti diamanatkan UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU No.

32 Tahun 2004, 10 tahun kemudian diubah dengan UU No. 23 Tahun 2014, dan diubah kembali menjadi PERPU No. 2 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015 merupakan perubahan paradigma manajemen pemerintahan birokrasi yang berorientasi kepada efisiensi dan efektivitas. Penyelenggaraan birokrasi Pemerintah perlu diarahkan kepada prinsip mewujudkan good governance dengan berorientasi kepada 3 (tiga) pendekatan yaitu efisiensi, ekonomi dan pemerataan.

Pada awal 2003, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang lebih lanjut mengatur kriteria, standar susunan dan struktur organisasi perangkat daerah. Di dalam PP tersebut telah ditetapkan mengenai standar jumlah pembentukan dinas dan lembaga teknis daerah serta kriteria bobot pembentukan dinas di daerah. Peraturan ini dalam pelaksanaan awal telah menimbulkan polemik tersendiri dalam pengelolaan kelembagaan daerah mengingat belum jelasnya argumentasi dan dasar secara akademis mengenai penentuan standar jumlah 10 dinas bagi tingkatan provinsi dan 14 dinas bagi kabupaten/kota. Dengan kondisi tersebut, maka peraturan ini harus disosialisasikan ke seluruh daerah sehingga mampu menjadi pedoman dalam membentuk perangkat daerah yang dibutuhkan sesuai dengan potensi dan kompetensinya.

## **1.7. Definisi Konseptual**

### **1.7.1. Strategi**

Strategi merupakan suatu rumusan perencanaan untuk membuat keputusan dalam mencapai tujuan jangka panjang melalui pengintegrasian dan alokasi sumber daya agar tujuan organisasi dapat tercapai dan tepat sasaran.

### **1.7.2. Kemiskinan**

Kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada dibawah standart kebutuhan hidup minimum dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan dan papan.

### **1.7.3. SGD'S**

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu agenda pembangunan yang mampu menghadapi tantangan lama dan baru yang semakin meningkat dan juga menjadi suatu agenda transformasi yang akan membentuk kembali perkembangan global yang bermanfaat bagi generasi yang akan datang.

### **1.7.4. Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai fungsi-fungsi pemerintahan daerah otonomi yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dan DPRD yang merupakan lembaga pemerintahan daerah menurut asas desentralisasi.

## 1.8. Definisi Operasional

Menurut (Sugiyono, 2014), definisi operasional merupakan seperangkat petunjuk lengkap terkait hal yang harus diamati dan mengukur suatu variabel atau konsep guna menguji kesempurnaan. Berdasarkan judul penelitian yang diteliti maka dapat diperoleh definisi operasional sebagai berikut.

**Tabel 1.2. Definisi Operasional**

<b>Tujuan</b>	<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>
Untuk Mengetahui Strategi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Strategi organisasi	a. Perumusan strategi melalui visi dan misi b. Perumusan visi dan misi ke dalam suatu program atau kegiatan
	Strategi Program	a. Fokus keterlibatan strategi b. Aspek-aspek yang meliputi strategi program
	Strategi Pendukung Sumber Daya	a. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana b. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia c. Pemanfaatan Sumber Daya Finansial
	Strategi Kelembagaan	a. Penguatan strategi lembaga dalam menghadapi permasalahan b. Pemanfaatan unsur kelembagaan berupa standar operasional prosedur (SOP)

## **1.9. Metode Penelitian**

### **1.9.1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Moleong 2007 :6) menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

### **1.9.2. Unit Analisa**

Berdasarkan penjelasan pembahasan di atas, maka unit analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten Sleman.

### **1.9.3. Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data Primer merupakan kumpulan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini sumber data primer yang diambil oleh peneliti yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya melalui wawancara kepada narasumber yang disesuaikan oleh kebutuhan peneliti.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang didapatkan dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang telah ada. Peneliti mendapatkan data-data yang berhubungan dengan laporan program, dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPKD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), laporan monitoring dan evaluasi dokumen kerjasama dan dokumen pelaksanaan anggaran.

#### **1.9.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat dalam proses penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi.

##### a. Wawancara

Penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai pedoman namun dapat berkembang dan lebih bebas sesuai dengan situasi dan informasi yang dibutuhkan oleh informasi dari ketua, sekretaris, sub bagian kelompok kerja TKPKD, penanggung jawab TKPK dan masyarakat desa yang terdampak kemiskinan. Wawancara semi struktur memiliki tujuan yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka,



dimana pihak yang diwawancara diminta ide dan pendapatnya. Berikut ini adalah daftar informan yang akan di wawancara:

**Tabel 1.3. Data Wawancara**

<b>Instansi</b>	<b>Narasumber</b>	<b>Jabatan</b>
Pemerintah Daerah	Kepala TKPKD Kabupaten Sleman	Wakil Bupati Sleman
	Sekretariat TKPKD Kabupaten Sleman	Kepala BAPPEDA
	Kelompok Kerja TKPKD Kabupaten Sleman	Sub Bagian Kelompok Kerja TKPKD Kabupaten Sleman
	Masyarakat Desa terdampak kemiskinan	3 Masyarakat Desa

b. Dokumentasi

Dalam penelitian dokumentasi digunakan sebagai data pendukung yang dapat memperkuat hasil penelitian guna menunjukkan kebenaran data selama penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini dokumentasi berbentuk data ataupun laporan yang berkaitan dengan kegiatan mengatasi kemiskinan di Kabupaten Sleman.

### **1.9.5. Analisis Data**

#### **a. Pengumpulan Data**

Menurut (Thalha et al., 2019) Pengumpulan data merupakan sebuah teknik bagian yang diperlukan peneliti, peneliti harus sudah mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam fokus penelitian. Setiap rumusan pertanyaan membutuhkan Teknik pengumpulan data yang berbeda-beda. Tekniknya berupa wawancara, teknik observasi dan dokumentasi.

#### **b. Reduksi Data**

Menurut (Nugrahani, 2014 :174) merupakan proses analisis data untuk penelitian kualitatif yang memiliki tujuan untuk menggolongkan, memperjelas, mengarahkan, dan membuat fokus dengan melakukan proses seleksi data dengan baik untuk mempermudah sajian data yang mudah dipahami. Berdasarkan teori diatas maka dalam tahap penulis melakukan seleksi data untuk memilah data mana yang bisa digunakan ataupun relevan terhadap penelitian tersebut.

#### **c. Mengolah Data**

Dalam tahap ini penulis akan melakukan pengolahan data setelah data terpilah dengan baik. Pengolahan data tersebut bertujuan untuk mengolah data yang sudah

direduksi. Data-data yang sudah diolah tersebut akan digunakan untuk penyajian data dalam penelitian ini.

#### d. Penyajian Data

Menurut (Nugrahani, 2014: 175) merupakan rakitan informasi yang lengkap berdasarkan inti dari temuan yang ada dalam proses reduksi data dengan penyajian bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Dalam tahap ini penulis akan menyajikan data dalam berbagai bentuk seperti : gambar, grafik, began, table dan ilustrasi

#### e. Penarikan Kesimpulan

Menurut (Nugrahani, 2014 : 176) penarikan kesimpulan dapat dikatakan sebagai kegiatan tafsiran dari hasil analisis dan interpretasi data. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti akan menarik, kesimpulan berdasarkan judul penelitian, tujuan penelitian, rumusan masalah, data yang ada dalam penelitian, teori yang relevan dan temuan dari hasil analisis data dalam penelitian.